



Judul : Dari Petani Hingga Pembajakan Karya Seni
Tanggal : Selasa, 13 Januari 2015
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

Dari Petani Hingga Pembajakan Karya Seni

■ M Akbar Wijaya, Agus Raharjo

Anggota DPR harus mempertanggungjawabkan dana reses.

JAKARTA — Masa reses anggota DPR telah berakhir. Pimpinan DPR meminta para anggota melaporkan hasil resesnya. Lalu apa saja yang mereka kerjakan selama satu setengah bulan terakhir?

Politikus PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IX, Maruarar Sirait, memanfaatkan masa reses untuk memperjuangkan pengairan bagi para petani Subang. Menurutnya, para petani telah bertahun-tahun menanti janji pemerintah membuat sodetan Sungai Tarum Timur. "Selama ini saya memperjuangkan supaya ada sodetan. Tapi, belum berhasil," kata Maruarar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/1).

Politikus yang akrab disapa Ara ini mengatakan, sodetan Sungai Tarum Timur sepanjang tujuh kilometer akan mengairi sekitar 12 ribu

hektare lahan pertanian di Kecamatan Pusakajaya, Pusakanegara, Compreng, Legon Kulon, dan Pamuanan. Harapannya, para petani bisa meningkatkan hasil panen mereka dari sekali setahun menjadi dua kali setahun. "Ini terkait swasembada beras dan target produksi beras Jawa Barat mencapai 2 juta ton," ujar Maruarar.

Ketua Umum Ormas Taruna Merah Putih berjanji akan mengawasi proses pembangunan sodetan Sungai Tarum Timur. Maruarar mengaku akan melaporkan kinerja Menteri PU jika proyek tidak selesai dalam waktu dua tahun. "Kita tak mau main-main dengan harapan dan kepentingan rakyat," ujarnya.

Politikus PPP daerah pemilihan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Okky Asokawati, menghabiskan masa reses dengan meninjau pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di sejumlah wilayah di Jakarta. Berdasarkan pantauannya, sejumlah kantor BPJS belum melayani warga secara optimal.

"Saya menemukan di BPJS Perdatam (Jakarta Selatan), antreannya luar biasa," ujar anggota Komisi IX DPR RI ini. Layanan yang



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

kurang optimal terjadi karena kantor BPJS kekurangan tenaga administrasi. Alhasil, warga yang ingin membuat kartu BPJS terpaksa harus mengantre dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

Okky juga mengaku mendapat sejumlah keluhan dari tenaga medis soal implementasi program BPJS Kesehatan di rumah sakit. Mereka menyayangkan sikap Kementerian Kesehatan yang tidak berupaya memperbaiki sistem harga dalam pembayaran BPJS. Harga obat yang mesti disediakan pihak rumah sakit terkadang mengalami kenaikan. "Harusnya ada rapat berkala tentang harga obat antara rumah sakit dan Kemenkes," ujar Okky.

Mantan peragawati ini berjanji akan menindaklanjuti hasil resesnya dalam rapat bersama Menteri Kesehatan. Dia juga memastikan akan membuat laporan hasil reses kepada pimpinan DPR. "Wajib anggota DPR melaporkan temuannya," kata Okky.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PAN Anang Hermansyah mengaku mendapat banyak keluhan soal pembajakan karya seni dari para seniman. Anang berharap DPR segera mencari solusi mengakhiri persoalan pembajakan di masyarakat. "Setelah reses, ingin menyampaikan bahwa pembajakan terhadap rekan-rekan di Jawa Timur belum ada solusi," ujar Anang.

Pembajakan karya seni di Indonesia telah berlangsung masif dan terorganisir. Anang mengatakan melawan pembajakan menjadi salah satu urgensi nasional yang mesti dilakukan DPR. "Ini untuk menghadapi era globalisasi, DPR bisa membuat badan penanggulangan masalah-masalah ini," kata Anang.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pimpinan DPR akan menggelar rapat dengan Badan Muhyawarah (Bamus) tentang mekanisme pelaporan aspirasi konstituen dan penggunaan dana aspirasi selama masa reses. Dia menginginkan kinerja anggota DPR selama kurang lebih satu setengah bulan bisa dipertanggungjawabkan. "Besok (Selasa) akan dibahas dalam Bamus mekanisme pelaporan aspirasi dan penggunaan dana reses," ujar Fahri.

Wakil Ketua DPR lainnya, Taufik Kurniawan mengatakan sebagian laporan hasil reses anggota sudah dilaporkan. Namun, masih ada sebagian anggota dewan yang belum membuat laporan.

"Paling lama dua pekan, setiap anggota harus membuat laporan reses ini," kata Taufik.

■ ed: a syalaby ichsan